

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan sudah di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XXI Pasal 45:

- (a) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik.
- (b) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>1</sup>

Juga Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII Pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”
- (2) “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang memiliki lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 45 Ayat 1.

(3) ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”<sup>2</sup>

Dalam proses pendidikan, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sehingga tercipta proses belajar mengajar yang aktif, kreatif dan inovatif serta menyenangkan. Selain itu tidak hanya dalam tercapainya proses pendidikan secara optimal, tetapi dalam proses sarana dan prasarana juga yaitu untuk tercapainya suatu akreditasi yang baik untuk lembaga pendidikan.

Dalam hal ini di jelaskan dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab XVI pasal 60 tentang akreditasi di jelaskan bahwa:

- (a) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (b) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public.
- (c) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang SISDIKNAS UU RI tahun 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 89

(d) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

Setelah dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan, maka langkah selanjutnya yaitu mengkaji hakikat dan makna dari temuan penelitian. Masing-masing dari temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

#### **A. Perencanaan sarana dan prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar**

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik. Supaya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengembangkan suatu pengelolaan dalam pendidikan pada dasarnya harus menganalisa aspek yang terkait dengan lembaga pendidikannya, dalam hal ini perencanaan merupakan kegiatan permulaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Menurut Ary H. Gunawan dalam buku administrasi sekolah bahwa perencanaan yang sistematis untuk menerapkan pengetahuan yang tepat dan berguna untuk mengontrol dan menentukan setiap langkah kegiatan dan proses perencanaan pendidikan terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan sekolah dan tujuan siswa serta kebutuhan dan tujuan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Pedoman Akreditasi Madrasah*,.. hal. 7

<sup>4</sup> Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), hal 118

Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus betul-betul merupakan proses intelektual.
2. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan.
3. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus realistiis, sesuai dengan kenyataan anggaran.
4. Visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, merek, dan harganya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini perencanaan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar selalu melihat skala kebutuhan prioritas kebutuhan dan tingkat kepentingan perencanaan sarana dan prasarana yang ada, baik kebutuhan kelas, kantor, maupun kebutuhan lainnya dan juga akan mempertimbangkan dana yang akan digunakan dalam perencanaan. Perencanaan MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar ada di program kerja tahunan yang dilakukan pada tahun ajaran baru di awal semester sehingga memudahkan untuk membahas kebutuhan apa saja yang akan direncanakan sesuai kegiatan sekolah .

---

<sup>5</sup> Ibrahim bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar : Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal 27

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan pada hakikatnya memberikan dampak perubahan terhadap akreditasi sekolah sehingga dapat membangun kinerja personel sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Bambang Suryadi dalam buku pedoman akreditasi madrasah tsanawiyah bahwa Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas public. Secara istilah akreditasi diartikan sebagai satu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.<sup>6</sup>

Dalam konteks akreditasi sekolah, baik negeri maupun swasta dengan memberikan dan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditasi dan hasil dari penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Perencanaan perlengkapan pendidikan merupakan upaya memikirkan perlengkapan yang diperlukan di masa yang akan datang dan bagaimana pengadaannya secara sistematis, rinci, dan teliti berdasarkan informasi dan realistis tentang kondisi sekolah. Perencanaan yang dilakukan MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar adalah terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan terhadap akreditasi serta dana yang akan diperlukan.

---

<sup>6</sup>Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta : Depag RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), hal. 5

Dalam membuat perencanaan akreditasi yang dilakukan oleh MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar yaitu membuat evaluasi dari setiap standar secara rinci, kemudian mengkajinya masing-masing untuk mempertimbangkan mana saja yang bisa di kejar dan tidak. Secara proses sarana dan prasarana di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar terus berjalan, proses inilah yang menjamin bahwa pencapaian nilai itu akan bisa didapatkan sesuai target. Karena, kalau prosesnya tidak berjalan dengan baik maka tidak akan pernah ada kemajuan pada akreditasi.

## **B. Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana dalam pencapaian akreditasi**

### **A di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar**

Berdasarkan paparan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilaksanakan, pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar berfokus pada pengadaan, inventarisasi, pengawasan dan pemeliharaan.

#### **1. Pengadaan**

Pengadaan sarana dan prasarana yaitu berbagai kegiatan pengadaan alat dan barang berdasarkan rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan membuat sendiri, menyewa, meminjam, dan membeli.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, pengadaan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar dilakukan sesuai perencanaan melalui analisis kebutuhan

---

<sup>7</sup> Doni Juni dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal, 226

dengan melakukan pembelian atau membuat sendiri. Namun, tidak terlepas dengan anggaran yang sudah tersedia. Pengadaan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar untuk pembelian yaitu dengan cara membeli melalui dana BOS dan menggunakan dana Jariyah murid.

Dimana, dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang BOS. Dana BOS sendiri adalah sebuah bantuan dana untuk sekolah yang menjadi program pemerintah untuk membantu sekolah dalam pendanaan biaya operasional dan non personalia. Menurut Peraturan Pemerintah NO 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk peralatan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi dan pajak.<sup>8</sup>

Adapun pengadaan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar dilakukan yaitu dengan cara pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, pinjaman, daur ulang, dan perbaikan atau rekondisi.

## 2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan awal setelah penerimaan barang. Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang-barang yang dimiliki unit maupun yayasan. Apabila dalam inventarisasi terdapat sejumlah perlengkapan yang tidak layak pakai maka dilakukan penghapusan maupun perbaikan .

Kegiatan inventarisasi atau pencatatan sarana dan prasarana ini merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan melakukan inventaris terhadap

---

<sup>8</sup> Peraturan pemerintah Pendidikan Dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2008 Tentang Dana BOS dan Peraturan Pemerintah NO. 48 Tahun 2008 Tentang Pendidikan.

sarana dan prasarana pendidikan, dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merk, ukuran harga dan sebagainya.

Kegiatan inventaris sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Bafadal kegiatan inventaris, meliputi:

- a. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku (kartu) stok barang.
- b. Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tertolong barang inventaris, caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya dan menuliskannya.
- c. Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan.<sup>9</sup>

Dalam inventarisasi di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar masih belum dilakukan secara maksimal. Dalam hal pencatatan atau pengkodean masih hanya sebatas stiker atau label barang saja. Tetapi, untuk laporan terkait pengeluaran MTs Ma'arif NU 2 SutojayanBlitar sudah menggunakan aplikasi yang kemudian dapat memudahkan pencatatan inventarisasi sekolah. Pelaporan dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat laporan dana BOS pada bulan januari dan juli.

Semua sarana dan prasarana harus diinventarisasi secara periodic, artinya secara teratur dan tertib berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diharapkan dapat tercipta administrasi barang, penghematan keuangan dan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*,...hal. 56

<sup>10</sup> Dedy H. Karwan, <http://PJJ-Vedca.depdiknas.go.id> pengawasan 8/materi/05 Administrasi (sarana dan Prasarana) Pdf 20 Maret 2020

### 3. Pengawasan dan Pemeliharaan

Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasana sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah serta agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai.

Pengawasan terhadap sarana dan prasarana adalah usaha yang dilakukan dalam mengontrol terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian aktivitas menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan pengajaran di sekolah. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan bersama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, murid, komite sekolah dan stakeholders lainnya. Hasil pengawasan sarana dan prasarana di laporkan dalam kurun waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun).<sup>11</sup>

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga agar barang milik sekolah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan yang sangat penting karna dengan adanya pemeliharaan yang baik maka penyelenggaraan pendidikan akan berjalan baik pula.

Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar yaitu dengan pengecekan yang bersifat rutin setiap hari oleh waka sarana dan prasarana dan anggota sarana dan prasarana lainnya. Mengecek jumlahnya rusak atau tidaknya dan akan di perbaik langsung saat

---

<sup>11</sup> Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, (Medan : CV Widya Puspita), hal 35

itu juga. Pemeliharaan dilakukan agar mengetahui keadaan sarana dan prasana apakah masih layak digunakan atau tidak, apabila ada sarana dan prasarana yang rusak dan tidak bisa di perbaiki lagi maka pengadaan sarana dan prasarana baru akan direncanakan.

Dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah baik sekolah yang memiliki akreditai A, B maupun sekolah yang terakreditasi C. tanpa di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sulit diharapkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu tinggi.

Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya suatu pendidikan madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan diantaranya tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan yaitu mulai adanya kepala madrasah, pendidik, peserta didik, kurikulum yang digunakan, sarana dan prasarana dan sumber dana yang tetap.<sup>12</sup>

Pada saat akan melakukan akreditasi, MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar membuat sebuah evaluasi mulai dari melakukan pemotretan masing-masing standar, kemudian melakukan inventarisasi yang dilanjutkan dengan diadakannya ekspos atau pemaparan data dari masing-masing standar lalu dinilai bersama. Dari membuat evaluasi ini maka akan diketahui mana saja yang prioritas dan tidak terlalu prioritas. Dalam pelaksanaan akreditasi sarana dan prasarana bukan hal yang diutamakan tetapi jika di presentasekan yaitu

---

<sup>12</sup> Hidayat Ara, Imam Machali, *Pengelola Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Educa, 2010), hal

dalam pelaksanaan akreditasi sarana dan prasarana berpengaruh 80%. Pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan secara langsung akan membawa sekolah melakukan pembenahan pada berbagai aspek melalui evaluasi.

### **C. Evaluasi Sarana dan Prasarana dalam Pencapaian Akreditasi A di MTs**

#### **Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar**

##### **1. Penghapusan**

Menurut Matin dan Nurhattati Fuad dalam buku manajemen sarana dan prasarana pendidikan penghapusan adalah kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat di pertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam penghapusan sarana dan prasarana di MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar yaitu masih belum pernah diadakan, jika ada kerusakan sarana maka akan di perbaiki dan jika tidak bisa diperbaiki sama sekali maka akan disimpan di gudang.

##### **2. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawab diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana

---

<sup>13</sup> Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), hal. 128

pendidikan pertanggungjawaban yaitu usaha yang di tempuh pimpinan dalam membantu personel madrasah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di madrasah.<sup>14</sup>

Dalam pertanggungjawaban sarana dan prasarana di MTs Ma'arif Nu 2 Sutojayan Blitar yaitu pertanggungjawaban berupa laporan dana BOS ke Dinas Pendidikan berupa pembelian barang-barang, ATK dll. Selain laporan dana BOS tersebut belum terdapat laporan khusus inventaris keseluruhan sarana dan prasarana.

Evaluasi pada manajemen sarana dan prasarana di MTs Ma'arif NU 2 Sutojayan Blitar yaitu pada saat rapat mingguan. Pada saat rapat tersebut waka sarana dan prasarana bertanggungjawab melaporkan apa saja yang terjadi pada sarana dan prasarana. Misal ada ditemukan kerusakan pada kelas-kelas. Kemudian tindak lanjut dalam memaksimalkan sarana dan prasarana agar mampu berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan acuan data hasil penilaian dan pengukuran berdasarkan sstandar atau kriteria yang telah di tetapkan. Hasil keputusan inilah berupa penetapan status akreditasi sekolah.

Akreditasi sekolah dimaknai sebagai upaya meningkatkan mutu, kinerja, dan produktivitas satuan pendidikan. Ada tiga hal penting dalam proses akreditasi sekolah agar hasilnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu masukan, proses, dan keluarannya. Akreditasi

---

<sup>14</sup> Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal 130

merupakan salah satu bentuk evaluasi yang penting dalam rangka mempertahankan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam proses akreditasi perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh mencakup aspek-aspek input, proses dan hasil.<sup>15</sup>

Hasil akreditasi sekolah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah program telah direncanakan tercapai atau belum, berharga atau tidak dan apakah efisien dalam pelaksanaannya. Akreditasi berfungsi mendorong madrasah agar memenuhi akuntabilitas public terhadap penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga akreditasi mempunyai fungsi diantaranya adalah jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilih sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggungjawab, mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan serta yang terakhir dengan akreditasi madrasah akan merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

---

<sup>15</sup>Khairuddin, *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah*, Jurnal Serambi Ilmu edisi maret, Vol. 17, No. 2, 2014, hal. 108